

Analisis Pengelolaan dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Di Kota Malang

Nova Adelia ^{1*}, Nisfatun Choiriyah ², Eva Hany Fanida ³, Revienda Anita Fitrie ⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674245@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal Kota Malang melalui pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi penguatan kemandirian fiskal daerah di era desentralisasi, di mana banyak pemerintah daerah, termasuk Kota Malang, masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan optimalisasi PAD dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan daerah, laporan realisasi anggaran, dokumen resmi pemerintah, publikasi statistik, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kota Malang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode 2019–2023, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah. Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal masih tergolong rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Faktor pendukung optimalisasi PAD meliputi besarnya potensi ekonomi daerah dan penerapan digitalisasi layanan perpajakan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sistem administrasi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi seperti intensifikasi pajak, pengembangan sektor pariwisata, optimalisasi aset daerah, digitalisasi pelayanan, serta diversifikasi sumber pendapatan. Dengan strategi tersebut, diharapkan PAD dapat menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Regional Original Income, Fiscal independence, Optimization, Regional Development,*

Pendahuluan

Penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Kebijakan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip otonomi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (Pratiwi & Setyowati, 2026).

<https://doi.org/10.30605/jss.6.3.2026.1355>

Otonomi daerah pada hakikatnya tidak hanya memberikan kewenangan administratif, tetapi juga menuntut adanya kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal guna menjaga stabilitas ekonomi, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pimen & Yunita, 2026). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya sendiri, sehingga semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dalam PAD yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi kedua sumber ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, pengelolaan aset daerah serta inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru juga menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan PAD (Rahma et al., 2026).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa peningkatan PAD memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan daerah dan efektivitas pembangunan. Daerah yang mampu mengoptimalkan PAD cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik serta lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebaliknya, daerah dengan kontribusi PAD yang rendah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ruang fiskalnya menjadi terbatas. Namun demikian, dalam praktiknya, optimalisasi PAD masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya sistem pemungutan pajak dan retribusi, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Selain itu, masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan inovasi teknologi dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga efisiensi dan efektivitas pemungutan belum optimal.

Kota Malang sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan PAD. Kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat lokal maupun luar daerah. Keberadaan berbagai perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, sektor kuliner, serta destinasi wisata menjadikan Kota Malang sebagai salah satu kota dengan dinamika ekonomi yang cukup tinggi. Aktivitas ekonomi tersebut berpotensi besar dalam meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah (BPS Kota Malang, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan PAD apabila dikelola secara optimal. Namun demikian, meskipun PAD Kota Malang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum dominan dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap dana transfer tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Malang masih perlu ditingkatkan.

Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembangunan daerah, terutama apabila terjadi penurunan alokasi dana dari pemerintah pusat atau adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan di Kota Malang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk melaksanakan berbagai program sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan PAD agar dapat mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Optimalisasi PAD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan, tetapi juga mencakup perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Hal ini meliputi peningkatan kualitas administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa PAD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi PAD, seperti belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas tentang optimalisasi PAD. Peningkatan PAD sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak dan penggunaan sistem digital (Putri & Rahayu, 2021). Kendala utama dalam peningkatan PAD adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan sumber daya manusia (Wulandari, 2022). Sementara itu, inovasi kebijakan serta pemanfaatan potensi ekonomi daerah sangat penting dalam meningkatkan penerimaan (Lestari et al., 2024). Namun, berbagai kajian tersebut masih cenderung membahas PAD secara umum dan belum mengkaji secara mendalam pada satu daerah dengan melihat potensi sektor unggulan sekaligus faktor pendukung dan penghambatnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian ini memiliki kebaruan (*novelty*), yaitu mengkaji optimalisasi PAD di Kota Malang secara lebih komprehensif dengan menyoroti potensi sektor utama seperti pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata, serta menganalisis faktor yang mendukung dan menghambatnya.

Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah dalam kajian ini adalah: 1). bagaimana pengelolaan PAD di Kota Malang. 2). sejauh mana PAD telah dioptimalkan. 3). apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. 4). bagaimana peran PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai pengelolaan dan optimalisasi PAD di Kota Malang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan PAD. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kontribusi PAD dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis maupun praktis.

Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai keuangan daerah dan otonomi fiskal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola serta mengoptimalkan PAD, sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan Kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisa, dan menginterpretasikan fenomena pengelolaan serta optimalisasi PAD. Secara mendalam, bukan hanya untuk mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang terstruktur, factual, dan tepat tentang keadaan pengelolaan PAD, potensi sumber-sumber pendapatan daerah, serta upaya optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Fokus penelitian ini adalah Kota Malang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama pada sektor pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Keempat sektor tersebut berfungsi sebagai inti dalam pembentukan PAD dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dengan fokus tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana pengelolaan PAD dilakukan, sejauh mana optimalisasi telah dicapai, serta faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan maupun hambatan dalam pengelolaan PAD.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut meliputi artikel ilmiah, jurnal akademik, buku referensi, dokumen peraturan perundang-undangan, laporan APBD, laporan realisasi PAD, serta publikasi statistik resmi seperti data dari BPS dan dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, desentralisasi fiskal, serta optimalisasi PAD sebagai bahan pembandingan dan penguat analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, serta mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Dalam hal ini, peneliti juga melakukan seleksi terhadap sumber data berdasarkan tingkat kredibilitas, validitas, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Sumber yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi ilmiah terindeks, dokumen resmi pemerintah, serta data statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam isi dari dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, tema, serta makna yang berkaitan dengan pengelolaan dan optimalisasi PAD. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data, yaitu penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk narasi yang mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Peneliti juga melakukan interpretasi kritis terhadap berbagai kebijakan dan strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Hal ini mencakup analisis terhadap efektivitas kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung seperti potensi ekonomi daerah, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat, serta faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan demikian, data yang digunakan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa seluruh data yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan dan optimalisasi PAD di Kota Malang, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan keuangan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Hasil

Tren dan Perkembangan PAD Kota Malang Tahun 2019–2023

Berikut disajikan data realisasi PAD Kota Malang selama periode 2019–2023.

Tabel 1. Realisasi PAD Kota Malang Berdasarkan Komponen Tahun 2019–2023

Komponen PAD	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	Rp540 M	Rp440 M	Rp430 M	Rp510 M	Rp736 M
Retribusi Daerah	Rp120 M	Rp98 M	Rp105 M	Rp115 M	Rp92 M
Kekayaan Daerah Dipisahkan	Rp55 M	Rp52 M	Rp54 M	Rp58 M	Rp60 M
Lain-lain PAD Sah	Rp145 M	Rp128 M	Rp111 M	Rp162 M	Rp264 M
Total PAD	Rp860 M	Rp718 M	Rp700 M	Rp845 M	Rp1,15 T
Pertumbuhan (%)	—	-16,5%	-2,5%	+20,7%	+36,1%

Berdasarkan Tabel 1, PAD Kota Malang mengalami penurunan pada tahun 2020–2021 dan kembali meningkat pada 2022–2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, dominasi pajak daerah mencerminkan bahwa struktur PAD masih bergantung pada sektor tertentu, sehingga belum sepenuhnya terdiversifikasi.

Kontribusi PAD dalam Pembiayaan Pembangunan Kota Malang

Perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Total Pendapatan Daerah dan Rasio Kemandirian Kota Malang 2019–2023

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Daerah	Dana Transfer	Rasio Kemandirian
2019	Rp860 M	Rp2,08 T	Rp1,22 T	41,3%
2020	Rp718 M	Rp1,89 T	Rp1,17 T	38,0%
2021	Rp700 M	Rp1,98 T	Rp1,28 T	35,4%
2022	Rp845 M	Rp2,12 T	Rp1,27 T	39,9%
2023	Rp1,15 T	Rp2,81 T	Rp1,13 T	40,9%

Berdasarkan Tabel 2 rasio kemandirian fiskal Kota Malang selama periode penelitian berada di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Strategi Optimalisasi dan Diversifikasi PAD Kota Malang

Strategi optimalisasi PAD Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Matriks Strategi Optimalisasi PAD Kota Malang

Strategi	Langkah Implementasi	Target/Hasil yang Diharapkan
Intensifikasi Pajak	Pemetaan ulang wajib pajak, pemutakhiran data NPWPD, penguatan sistem e-Samsat dan e-BPHTB	Peningkatan <i>tax coverage ratio</i> , peningkatan efektivitas pajak hotel dan restoran
Pengembangan Pariwisata	Penataan kawasan wisata kota, promosi destinasi kuliner dan seni, integrasi dengan sektor UMKM	Kenaikan pajak hotel, restoran, dan hiburan; peningkatan kunjungan wisatawan domestik
Optimalisasi Aset Daerah	Inventarisasi dan sertifikasi aset, pemanfaatan lahan tidur melalui skema BOT dan kerja sama pemanfaatan	Penambahan komponen lain-lain PAD sah; kontribusi hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan
Digitalisasi Layanan	Penerapan sistem pembayaran digital, integrasi data wajib pajak berbasis teknologi informasi	Efisiensi biaya pemungutan, peningkatan kepatuhan pajak, transparansi pengelolaan PAD
Diversifikasi Sumber Pendapatan	Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM berbasis digital, industri jasa berbasis pengetahuan	Mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional; memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang

Berdasarkan Tabel 3, strategi yang dapat dilakukan meliputi intensifikasi pajak, pengembangan pariwisata, optimalisasi aset daerah, digitalisasi layanan, dan diversifikasi sumber pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga membutuhkan inovasi serta pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara lebih luas.

Pembahasan

Analisis Tren PAD dan Dampak Pandemi

Hasil menunjukkan bahwa dinamika PAD Kota Malang selama periode 2019–2023 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, khususnya dampak pandemi COVID-19. Penurunan PAD yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 mencerminkan adanya kontraksi aktivitas ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang menjadi basis utama penerimaan daerah seperti hotel, restoran, dan hiburan. Pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan PPKM menyebabkan turunnya tingkat konsumsi dan kunjungan wisata, sehingga berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor unggulan daerah. Hal ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa penurunan aktivitas ekonomi akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD (Triarda & Damayanti, 2021). Namun demikian, fase pemulihan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya rebound ekonomi yang cukup kuat. Peningkatan PAD pada tahun 2023 mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi sekaligus adanya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak serta pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi. Peningkatan PAD pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi sekaligus perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas PAD tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan dan sistem pengelolaan yang diterapkan. Temuan ini didukung oleh kajian yang menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah mengalami perubahan signifikan sebelum dan sesudah pandemi (Zakaria & Dede, 2022; Haryanto, 2017).

Kemandirian Fiskal Daerah

Sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat, yang menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah (Muhamad Zulfan Arief., 2025). Rasio kemandirian fiskal Kota Malang yang masih berada di bawah 50% menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), masih menjadi karakteristik utama dalam struktur pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD mengalami peningkatan, kontribusinya belum cukup kuat untuk mencapai kemandirian fiskal yang optimal. Kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat (Novianti & Ishak, 2022; Pabayo, 2025; Hasanah et al., 2024).

Kemandirian fiskal juga dapat dilihat dari perbandingan PAD dengan dana transfer dan pinjaman yang dimiliki daerah (Suharjo & Suhendro, 2024). Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin rendah ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Hidayat & Wijaya, 2023). Hal ini juga diperkuat oleh kajian yang menyatakan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih berada pada kategori belum mandiri karena PAD lebih kecil dibandingkan dana transfer (Lestari et al., 2022). Meskipun demikian, adanya peningkatan rasio kemandirian pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi PAD melalui penguatan kebijakan fiskal daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat PAD

Peningkatan PAD Kota Malang didukung oleh struktur ekonomi daerah yang kuat, terutama pada sektor pendidikan, pariwisata, dan perdagangan. Aktivitas ekonomi pada sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD. Kajian sebelumnya juga menyebutkan bahwa optimalisasi potensi daerah, termasuk sektor UMKM dan ekonomi kreatif, dapat memperluas basis penerimaan pajak daerah (Triarda & Damayanti, 2021). Selain itu, efektivitas pajak daerah seperti pajak reklame juga berkontribusi terhadap peningkatan PAD (Indrawati et al., 2025).

Kendala dalam optimalisasi PAD, seperti lemahnya administrasi perpajakan, keterbatasan data wajib pajak, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan potensi PAD yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (Ariyanto & Pratama, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menghambat kepatuhan wajib pajak, antara lain rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak, kondisi ekonomi wajib pajak, serta kelemahan dalam aspek administrasi dan kebijakan pemerintah seperti kurangnya sosialisasi dan lemahnya penegakan sanksi (Nugraha et al., 2022).

Strategi Optimalisasi dan Diversifikasi PAD

Strategi optimalisasi PAD Kota Malang perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada melalui perbaikan sistem administrasi, pemutakhiran data wajib pajak, serta peningkatan pengawasan. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak

hanya bergantung pada sumber yang sudah ada, tetapi juga membutuhkan inovasi dalam mencari sumber pendapatan baru. Strategi ini sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan pajak daerah, seperti pemutakhiran data objek pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Fahmi, 2024).

Optimalisasi aset daerah juga menjadi langkah penting karena pengelolaan aset yang baik dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap PAD. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata dapat menjadi alternatif sumber PAD yang berkelanjutan (Pratista et al., 2025). Di sisi lain, pengelolaan APBD yang efektif juga berperan penting dalam mendukung optimalisasi PAD. Efisiensi anggaran dan investasi harus dilakukan secara tepat agar dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun, efisiensi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat berdampak negatif terhadap kemandirian fiskal (Talia & Hukom, 2024). Selain itu, inovasi daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan baru melalui proses komersialisasi dan monetisasi. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan (Saksono, 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan optimalisasi PAD dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kota Malang selama periode 2019–2023 mengalami tren fluktuatif namun meningkat secara keseluruhan, dari Rp860 miliar pada 2019 menjadi Rp1,15 triliun pada 2023, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah. Meskipun demikian, rasio kemandirian fiskal masih berada pada kisaran 35,4%–41,3% dan belum mencapai 50%, yang menegaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tujuan penelitian tercapai, yaitu mengidentifikasi kondisi pengelolaan PAD, kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD perlu dilakukan secara komprehensif melalui intensifikasi pajak, digitalisasi layanan, pengembangan sektor pariwisata, optimalisasi aset daerah, serta diversifikasi sumber pendapatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan tanpa melibatkan data primer dari wawancara atau observasi langsung, sehingga belum menangkap dinamika implementasi kebijakan secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer melalui wawancara atau survei, mengukur indikator kinerja seperti efektivitas dan elastisitas pajak, serta melakukan studi komparatif antar daerah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan aplikatif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Ariyanto, D., & Pratama, R. (2023). Tax compliance behavior and local revenue optimization in Indonesian regions. *Journal of Public Finance and Taxation*, 5(2), 77–90.
<https://doi.org/10.31098/jpft.v5i2.1589>
- Fahmi, Z. A. A. (2024). Analisis strategi optimalisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Unit

- Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 3(1), 56–60.
<https://doi.org/10.53625/jemba.v3i1.7440>
- Haryanto, J. T. (2017). Mapping the Local Own Resources (PAD) Performance and Regional Dependence in Indonesia 2008–2014: Quadrant Method Approach. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 41–52.
<https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.41-52>
- Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada. (2024). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening fiscal independence of Indonesian local governments. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(4).
<https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>
- Hidayat, R., & Wijaya, T. (2023). Fiscal dependence and regional financial independence in Indonesia: Evidence from local government financial reports. *Journal of Indonesian Public Administration*, 9(2), 88–101. <https://doi.org/10.1108/jipa.2023.09201>
- Indrawati, P. B., Khaerunnisa, D. A., Aziza, L. N., Hidayatul, N. A., & Tara, S. M. (2025). Analisis efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2018–2024. *Public Sphere Review*, 4(2), 136–148.
<https://doi.org/10.30649/psr.v4i2.164>
- Lestari, A., Frinaldi, A., & Wahyuni, Y. S. (2024). Optimalisasi Pendapatan Asli (PAD) Melalui Inovasi Pendidikan. *Menara Ilmu*, 18(1), 106–107.
<https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5267>
- Lestari, D., Nugroho, A., & Santoso, B. (2022). Analysis of fiscal independence in Indonesian local governments: PAD versus intergovernmental transfer. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–59. <https://doi.org/10.22212/jepp.v13i1.1124>
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Nugraha, I., Sari, M., & Putri, L. (2022). Determinants of taxpayer compliance in local tax systems: Evidence from Indonesian municipalities. *Journal of Indonesian Tax Policy*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.22219/jitp.v4i1.1765>
- Pabayo, A. S. T. (2025). Impact of fiscal decentralization policy on regional fiscal independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 8(1), 142–160.
<https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Pimen, G. A. B., & Yunita, E. (2026). Pengaruh Komunikasi Internal dan Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT VI Bapenda Kota Medan. *Journal Social Society*, 6(1), 580–593.
<https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1021>
- Pratiwi, R. D., & Setyowati, H. (2026). Analisis Penerimaan Retribusi Pemakaian Alat terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Logam Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. *Journal Social Society*, 6(2), 941–954.
<https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1170>

- Putri, D., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(2).
<https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.17645>
- Rahma, A. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025. *Journal Social Society*, 6(2), 1404–1415. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1281>
- Saksono, H. (2025). Economic Dimension of Regional Innovation. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4-13. <https://doi.org/10.21787/mp.9.1.2025.1-16>
- Suharjo, F. A., & Suhendro, S. (2024). Analysis of the effect of regional original revenue contributions and balanced funds on the level of regional financial independence of provinces in Indonesia in 2019–2023. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(3), 1–15. <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i3.727>
- Talia, N., & Hukom, A. (2024). Analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 461–467.
<https://doi.org/10.572349/neraca.v2i4.1370>
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35–54. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9350>
- Wulandari, N. L. P., et al. (2022). Efektivitas pajak daerah terhadap peningkatan PAD. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(3). <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i03.p05>
- Zakaria, R., & Dede. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 41–52. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>